

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2009

PERDA KAB SELAYAR NO. 11, LD.2009/NO.11 , LL. SETDA KAB.SELAYAR : 49 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, maka diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dengan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah; berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini : UU No. 29 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 1960; UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 40 Tahun 1994; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Kepres no 40 Tahun 1974; Kepres No 80 Tahun 2003 jo Perpres 95 Tahun 2007; Permendagri No 17 tahun 2007; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008.
- Dalam Perda ini diatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penerimaan dan Penyaluran; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penghapusan; Pemindahtanganan; Penatausahaan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Peralihan.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2009.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati, dan wajib ditetapkan 1 tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
 - Semua Perda yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Izin Gangguan yang telah ada sebelum berlakunya Perda ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.
 - Penjelasan 21 hlm.